

KEPENTINGAN TURKI UNTUK BERGABUNG DENGAN SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)

Erma Yunita Mustafa¹
Nim. 1202045062

Abstract

This article aims to explain the Turkey interest to join to Shanghai Cooperation Organization (SCO). The type of research is explanative analysis, the technique of data analyze is qualitative and using secondary data from internet and library research. To explain Turkey's interest to join Shanghai Cooperation Organization (SCO), the author uses regional security theory and national interest theory. The results of this study indicated that Turkey's interest to join fully in the SCO is based on the national interests developed by the AKP, the interests of security and economic. In the interest of security, Turkey wants to prevent the trans-national crime of drug trafficking and the spread of the influence of terrorism, in addition to the uncertainty of the membership in the European Union. In the economic interests, Turkey wants to increase national GDP by establishing free trade agreements with the member of the SCO, especially Russia and China, and with the increasing demands energy in the country, Turkey needs to participate in energy trading in Central Asia, so that the position of Turkey can be a supplier of energy from Central Asia to Europe.

Keywords : *Interest, Turkey, Shanghai Cooperation Organization*

Pendahuluan

Secara resmi *Shanghai Cooperation Organization (SCO)* ialah organisasi kerjasama antar pemerintah di kawasan Asia Tengah yang dibentuk pada tahun 2001 di Shanghai. Pendeklarasian SCO ditandai dengan masuknya Uzbekistan sebagai anggota organisasi. Prinsip dan tujuan dari SCO tertuang dalam Piagam SCO yang ditandatangani pada tahun 2002 di Moskow, yakni penguatan rasa saling percaya dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang. Kerja sama ini secara terperinci meliputi kerjasama keamanan untuk perdamaian dan stabilitas regional serta membangun kekuatan baru dalam bidang ekonomi dan politik dengan prinsip saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Kerjasama ekonomi merupakan aspek penting dalam area kerjasama bagi SCO karena kerjasama ini memberikan fondasi material dan garansi pembangunan yang lancar dari negara-negara SCO. (<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/111-cina-dan-shanghai-cooperation-organization>, diakses pada 05 Juni 2016). Disamping itu, SCO juga bekerjasamanya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: eyunita06@yahoo.com

pada peningkatan perdagangan, teknologi dan ilmu pengetahuan, budaya, edukasi, energi, transportasi, dan perlindungan lingkungan. Dalam perkembangannya SCO telah membuka prospek baru untuk memperluas pengaruh di luar kewasannya. Adanya jaminan keamanan dari SCO telah membangkitkan kepercayaan dari para anggotanya dalam hubungan bernegara baik regional maupun internasional. Beberapa negara yang dirangkul oleh SCO diluar negara anggota yakni Pakistan, India, Belaur, Mongolia, Iran, dan Afghanistan yang berstatus sebagai negara pengamat dan Sri Lanka, Turki, Armenia, Nepal dan Cambodia sebagai Mitra Dialog. (<http://www.infoshos.ru/en/?idn=10014>, diakses pada 05 Juni 2016).

Isu Turki ingin bergabung dengan SCO ialah terkait terbatasnya Turki wewenang yang dimiliki Turki sebagai mitra dialog di dalam SCO dan gagalnya membuat kemajuan substansial dalam upayanya bergabung dengan Uni Eropa. Tahun 2004 Turki diterima menjadi kandidat anggota resmi Uni Eropa dan telah menjalankan negoisasi pada 3 Oktober 2005. Seharusnya Turki dapat menyelesaikan negoisasi dalam 10 -15 tahun, tetapi progres negoisasi menjadi lambat dikarenakan Uni Eropa terbagi menjadi apakah Turki seharusnya bergabung atau tidak. Beberapa politisi yang oposisi menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa. Sebagian besar sikap oposisi tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan kultur dan identitas. Dalam hal ini, Turki sebagai negara dengan populasi masyarakat dominan Muslim dinilai tidak memiliki kecocokan dengan kultur dan identitas Eropa yang memiliki sejarah Kristen. (http://eprints.upnjatim.ac.id/4859/1/14_214227_Faidah_Rahim__Clash_of_Civilizations__Hambatan_Akses_Turki_ke_Uni_Eropa.pdf, diakses pada 26 Agustus 2016). Pada Desember 2006 negoisasi Turki ditanggguhkan atas keanggotaanya di Uni Eropa dikarenakan tidak mematuhi kewajiban protokol tambahan dan tidak ingin melepaskan Sirpus Utara sebagai Republik Sirpus. (<http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/shanghai-cooperation-organization-erdogan-turkey.html>, diakses pada 26 Agustus 2016).

Berdasarkan kebijakan luar negeri Turki yang baru telah membawa perubahan terhadap hubungan Turki dengan dunia Internasional dan cenderung lebih bersahabat dan akomodatif dengan negara-negara tetangga. Disadari oleh adanya doktrin “*Strategic depth*”, pada tahun 2002 Turki melakukan pendekatan terhadap Negara-negara Asia dalam mengkaji strateginya terhadap kawasan di sekelilingnya. Di bawah pimpinan Perdana Menteri Erdogan, Turki meningkatkan interaksi dengan Negara-negara Blok Timur di Asia Tengah melalui SCO.

Terhitung dari tahun 2007, 2009 dan 2010 Turki berupaya bergabung sebagai anggota SCO namun tidak mendapatkan respon. Kemudian, pada 23 Maret 2011 Turki resmi ditetapkan sebagai Mitra Dialog, aplikasi ini diterima oleh Kepala Dewan SCO pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing. Memorandum Mitra Dialog ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mr. Ahmed Davutoglu dan Sekretaris Jenderal Organisasi SCO, Dmitry Mezentsev pada pertemuan puncak tahunan SCO di Beijing Juni 2012. Dalam kunjungan bilateral ke Moscow pada Juni 2013, Perdana Menteri Erdogan telah melakukan dialog bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam konferensi pers di St.Petersburg, Perdana Menteri Erdogan meminta Presiden Vladimir Putin untuk memasukan Turki sebagai anggota resmi SCO. Perdana Menteri Erdogan juga

mengatakan kesiapannya untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di Eurasia, meminimalisir ancaman terorisme antar batas wilayah dan melepaskan upayanya untuk menjadi anggota Uni Eropa jika diterima menjadi anggota penuh SCO. Pada tahun 2015, India dan Pakistan diterima menjadi negara anggota oleh SCO serta dinaikannya status Belaurus dan Afghanistan menjadi negara pengamat sedangkan Turki belum mendapatkan progress signifikan dan masih berstatus sebagai mitra dialog. (<http://vps-1117292-13465.manage.myhosting.com/detail.php?id=132338>, diakses pada 05 Juli 2016) dan berupaya meminimalisir ancaman terorisme antar batas wilayah.

SCO merupakan organisasi regional yang cukup baru dan masih memiliki sedikit anggotaresmi di dalamnya. Dari segi pengalaman jika dibandingkan dengan NATO dan Uni Eropa maka SCO masih tertinggal cukup jauh. Selain itu Rusia dan China sebagai pendiri SCO juga merupakan penanding dari Uni Eropa dan NATO dimana Turki merupakan Negara yang cukup dekat dengan kedua organisasi ini sehingga dapat memberikan pengaruh dalam upayanya menjadi anggota SCO. Hingga saat ini Turki masih berstatus mitra dialog dan terus berupaya menaikkan statusnya menjadi negara anggota.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Keamanan Regional

Keamanan kawasan atau *regional security* merupakan konsep yang menekankan perhatian pada unsur regional/kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional melalui pembentukan *Regional Security Complexes*. Menurut Barry Buzan, dalam terminologi keamanan kawasan diartikan sebagai bagian dari hubungan keamanan yang secara terarah dan signifikan muncul di antara negara-negara yang berada dan “terkunci” di dalam kawasan tersebut, (Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era* 2nd Edition (New York : Harvester Wheatsheaf, 1990).

Hubungan regionalisme dengan keamanan regional cukup erat berkaitan karena munculnya regionalisme dalam konteks geografis adalah tumbuhnya homogenitas sosio-kultural, politik dan ekonomi sebagai hasil dari interaksi di antara bangsa-bangsa di kawasan tertentu dan keamanan regional merupakan suatu konsep atas kesepakatan di antara negara-negara di suatu kawasan untuk melindungi kawasan dari ancaman keamanan dan kejahatan. Ketika suatu kawasan sudah terbentuk menjadi sebuah regionalisme maka akan muncul suatu interaksi antar kawasan. Konsep ini dikenal dengan interregionalisme. Terdapat 3 bentuk *interregional arrangement* (interregionalisme), yaitu:

- (1) *relations between regional groupings atau group-to-group interregionalism*, dimana organisasi regional yang dibentuk oleh beberapa negara di kawasan tertentu menjalin kemitraan dialog dan kerjasama dengan organisasi regional dari kawasan lain. Masing-masing aktor yang terlibat kurang lebih akan bertindak sebagai bagian dari organisasi regional di mana mereka berafiliasi, seperti kemitraan dialog antara UE dan ASEAN;
- (2) *biregional and transregional arrangement*; merupakan bentuk interregionalisme yang melibatkan aktor-aktor dari dua atau lebih kawasan, namun arrangement-nya tidak terkait dengan keberadaan organisasi regional yang ada. Sekalipun dalam

beberapa aktivitas terdapat upaya koordinasi di bawah payung organisasi regional tertentu, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama biregional dan transregional ini tidak bertindak dalam kapasitas individualnya. Seperti Eurpoe-Lation America Rio Summit (*biregional endeavor*), East Asia- Latin America Forum (EALAF -transregional arrangement).

- (3) *hybrid interregionalism*, merupakan hubungan yang melibatkan pengelompokan regional dengan satu negara super power maupun *middle power*. Seperti EU-Russia, Eu-China, EU-Jepang, ASEAN-India, ASEAN-Australia, SCO-Turki.

Bentuk interregionalisme memiliki 5 peran menurut Doidge yakni 1. *Balancing*, 2. *Collective identity formation*, 3. *Agenda setting*, 4. *Institution building*, dan 5. *Rationalising*. (Mathew Doidge, From Developmental Regionalism to Developmental Interregionalism. The European Union Approach. NCRE Working Paper No. 07/01, July 2007). *Ballancing*, yakni interregionalisme mendorong aktor-aktor untuk menciptakan keseimbangan antar kawasan, untuk memelihara ekuilibrium dalam sistem internasional. *Institution Building*, terkait dengan pembentukan norma-norma dan institusi baik di masing-masing organisasi regional maupun di antara dua organisasi regional yang mencangkup tiga fungsi yakni, *intra-regional institution building*; *adherence to intitution*; dan *creation of cooperative structure* yang mencangkup intitusionalisasi dialog dan intitusi-intitusi subsider. *Rationalising*, berperan mendefinisikan dialog interregional sebagai “*potential clearing house of global multilateral fora*”. Peran *Angnda Setting*, terkait erat dengan peran rasionalisasi, tetapi melibatkan penetapan agenda kolektif ditingkat interregional yang kemudian akan diekspresikan dalam negoisasi-negoisasi di tingkat global. Fungsi pembentukan identitas kolektif inilah yang terikat dengan interregionalisme yang membantu pembentukan identitas regional, sebagai fondasi dari integrasi regional dan munculnya komunitas keamanan regional. (ibid).

Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional (national interest) adalah konsep yang populer dalam menganalisis hubungan internasional, baik dalam mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun mengajurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara (Mochtar Mas'ood. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta. PT. Pustaka LP3ES). Kepentingan nasional merupakan kriteria utama bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) untuk menentukan sikap atau tindakan dalam mengeluarkan kebijakan. Kepentingan nasional merupakan konsep yang umum, namun merupakan unsur yang sangat vital bagi sebuah negara. Unsur tersebut mencangkup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Hans. J Morgenthau, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideology yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Dalam konsep “*power*” Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yakni apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian

suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama. (Ibid:hal 163)

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu bangsa atau negara. Dalam hal ini kepentingan nasional relative sama, yakni keamanan (*security*) yang mencangkup kelangsungan hidup rakyatnya serta kebutuhan wilayah, dan kesejahteraan (*prosperity*) (T. May Rudy. Studi Strategis dalam transformasi sistem internasional pasca perang dingin. 2002). Menurut Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional merupakan kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat yang mencangkup pola lingkungan eksternalnya. Nuechterlein mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi 4 jenis, yakni:

1. Kepentingan Keamanan, merupakan kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan ekonomi, merupakan kepentingan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tata internasional, merupakan kepentingan untuk mewujudkan/mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negara dari ancaman luar.
4. Kepentingan ideologi, merupakan kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

Berdasarkan kebijakan luar negerinya maka Turki berusaha untuk menjaga keamanan, keharmonisan dan kepercayaan antar negara tetangga dengan menjalin kerjasama dengan organisasi yang memiliki kesamaan secara kultur dari negara-negara anggotanya. SCO merupakan organisasi yang sesuai dengan kepentingan Turki untuk menjaga keamanan negaranya dari berbagai ancaman eksternal. Serta organisasi yang cukup mumpuni dalam menjaga perdamaian antar negara anggotanya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dimana penulis menjelaskan kepentingan Turki untuk bergabung dengan SCO pada tahun 2013. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan pokok permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research* dimana pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literature yang memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun akses internet yang berkaitan. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis dengan menjelaskan dan menggambarkan data berdasarkan sumber-sumber tertulis.

Hasil Penelitian

Kepentingan Keamanan

Ancaman keamanan yang melanda Turki cukup kompleks, hal ini dipengaruhi oleh posisi geografis Turki yang berada di antara benua Asia dan Eropa dimana gangguan keamanan dapat muncul dari berbagai sisi. Salah satu isu yang menjadi konsentrasi Turki ialah maraknya perdagangan illegal obat-obatan terlarang yang berbasis di

kawasan Asia tengah dan melebarnya pengaruh kelompok Al-Qaeda yang berasal dari Suriah dan berbagai negara disekitar Turki.

A. Ancaman Perdagangan Narkoba

Turki menjadi salah satu negara yang digunakan sebagai jalur perdagangan narkotika internasional yang terhubung dengan negara-negara di Asia Tengah dan Timur Tengah. Turki berperan sebagai rute transit utama untuk perdagangan narkoba dari Iran dan Afghanistan menuju ke negara-negara Eropa melalui rute utama yakni rute Utara dan Balkan. Rute Utara dan Balkan merupakan koridor utama dalam perdagangan heroin yang menghubungkan Afghanistan ke pasar Rusia dan Eropa Barat. Rute Balkan melintasi Iran, (melalui Pakistan), Turki, Yunani, dan Bulgaria di Eropa Tenggara dan menuju ke pasar Eropa Barat, dengan nilai pasar tahunan sekitar \$20 miliar. Rute Utara melalui Tajikistan dan Krygistan (atau Uzbekistan dan Turkmenistan) ke Kazakhstan dan Rusia. Jumlah pasaran diperkirakan mencapai \$13 miliar per tahun. (<https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/>, diakses pada 15 Januari 2017).

Pada tahun 1999 otoritas Turki telah menyita 500 kg heroin di Agri. Turki tidak hanya sebagai titik point jalur rute transit heroin namun merupakan rumah bagi kilang heroin. Pada tahun 2000 terdapat 3000 ton bahan morfin yang disita di Iran, antara Yazd dan Kerman menuju ke Turki. Pada bulan Mei tahun 2000 polisi Turki menemukan 250 kg bahan morfin di Baskale provinsi Van, dekat perbatasan Iran, sementara pedagang obat bius ditangkap di Istanbul dengan 80 kg bahan heroin yang untuk di kirimkan ke Inggris. Bahan dasar morfin dan opium dari Afghanistan ke Turki melalui rute Iran meningkat dan memperkuat keyakinan bahwa produksi heroin terjadi di Turki serta negara-negara di Eropa Timur, sebelum diperdagangkan ke Eropa. (<http://geopium.org/?p=185>, diakses pada 12 Januari 2017). Penyelundupan narkoba tidak hanya terbatas pada opium saja, namun terdapat jenis narkoba yang digunakan sebagai bahan dasar kimia untuk membuat heroin, yakni *acetic anhydrie* (AA). Bahan ini berasal dari Eropa Barat dan Tengah dan dikirim melalui rute Balkan menuju ke Afghanistan melalui Turki. Turki tidak hanya digunakan sebagai rute satu arah saja namun juga digunakan sebagai jalur utama penyaluran obat-obatan terlarang baik dari Eropa maupun dari Asia Tengah. (Ibid)

Masuknya heroin ke dalam Turki tidak terlepas dari peran-peran kurir yang bekerja secara terorganisir. Rute Balkan dimulai dari Afghanistan dan Pakistan, dimana jaringan Afghanistan mengirim heroin melintasi perbatasan Iran, dan menurunkan muatan pada kelompok-kelompok yang nantinya akan mengelola transportasi sampai ke daerah-daerah perbatasan Turki. Kelompok di dalam Turki mengatur pengiriman masuk ke dalam Turki untuk dikirimkan kepada kelompok penerima. Kelompok Afghanistan tidak mengoperasikan pengiriman diluar perbatasan nasional mereka ketika pengiriman berlangsung di dalam rute Balkan, namun yang menjalankan ialah kelompok-kelompok Iran dan dalam skala kecil terdapat orang Bulgaria, Albania, dan Nigeria.

Kelompok ini aktif dalam penyelundupan opiat (heroin dan opium) di Turki. Perdagangan narkoba merupakan salah satu cara yang digunakan oleh organisasi teroris di Turki untuk mengumpulkan dana, selain dengan pencucian uang dan perdagangan senjata ilegal. Tidak terkecuali PKK, kelompok sparatisme Turki yang terdiri dari kelompok dari etnis Kurdi.

Sebagai negara dengan perdagangan narkoba terbesar, Afghanistan menjadi fokus dalam kebijakan keamanan SCO saat ini, untuk itu pada tahun 2015 SCO menaikkan posisi Afghanistan sebagai negara pengamat setelah sebelumnya berstatus sebagai mitra dialog. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan Afghanistan dalam usaha SCO untuk memperbaiki integrasi regional, memerangi penyelundupan narkoba, sparatisme, terorisme, ekstremisme (<http://www.dw.com/id/sco-beri-status-pengamat-bagi-afghanistan/a-16006115>, diakses pada 03 Februari 2017). SCO beri Status Pengamat Bagi Afghanistan. SCO memiliki perjanjian dalam memerangi narkoba di kawasan Asia Tengah yaitu *Agreement on Cooperation in Combating Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors* yang telah ditandatangani pada awal pembentukan S5. Dalam perjanjian ini kerjasama meliputi pertukaran informasi antar lembaga dan melakukan operasi bersama dalam mengendalikan perdagangan narkoba, psikotropika zat (https://www.unodc.org/tldb/pdf/SCO/Plan_of_Action_of_the_Shanghai_Cooperation_Organiion_Member_States_and_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan_on_combating_terrorism.pdf, diakses pada 15 Februari 2017) Keberadaan Afghanistan telah memberikan sinyal bagi Turki untuk dapat berpartisipasi penuh dalam SCO. Karena apabila Turki dapat diterima menjadi negara pengamat atau anggota penuh, maka Turki dapat memberikan suara dan mempengaruhi perumusan kebijakan terkait perdagangan narkoba.

Keberadaan Afghanistan didalam SCO dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan keamanan Turki. Hal ini dapat dilihat dari, apabila Turki diterima menjadi negara pengamat atau anggota penuh, maka Turki dapat memberikan suara penuh dan mempengaruhi perumusan kebijakan keamanan khususnya terkait perdagangan narkoba dan mendapatkan jaminan keamanan yang sama dengan negara-negara di Asia Tengah, yang *notabene* merupakan negara-negara dengan tingkat kejahatan narkoba terbesar.

Penting bagi SCO dalam memerangi kejahatan perdagangan narkoba, karena permasalahan ini merupakan kejahatan terbesar di dunia. Di Asia Tengah sendiri kejahatan ini merupakan kejahatan tertinggi dikarenakan terdapat negara pemasok narkoba yakni Afghanistan. Disamping adanya negara pemasok narkoba, kawasan Asia Tengah juga merupakan kawasan yang banyak terjadi konflik, dan akibat dari konflik tersebut dapat menimbulkan kemiskinan pada penduduknya sehingga menjadi penyelundup narkoba menjadi pilihan bagi sebagian penduduk untuk bertahan dari kondisi konflik.

Secara geografis SCO adalah organisasi yang cukup dekat dengan Turki. Berdasarkan persoalan keamanan antara SCO dan Turki memiliki kesamaan yakni ancaman kejahatan narkoba. SCO dapat memberikan jaminan keamanan

melalui perjanjian di awal pembentukan S5 yang telah berpengalaman cukup lama dalam menanggapi kejahatan narkoba di perbatasan negara-negara anggota, untuk itu Turki sebagai negara yang dekat secara geografis maupun kultural melihat adanya peluang untuk ikut serta guna mendapatkan jaminan dan pembelajaran dalam menanggapi persoalan kejahatan narkoba.

B. Ancaman Terorisme

Dalam kawasan Asia, Turki berbatasan langsung dengan Suriah dan Irak di sebelah Selatan serta Iran di sebelah Timur. Perbatasan Turki dengan Asia dipenuhi oleh munculnya kelompok-kelompok pengancam stabilitas negara, seperti kelompok terorisme Al-Qaeda. Kelompok ini merupakan kelompok terorisme internasional yang memiliki jaringan yang luas dan tersebar di negara-negara kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan bahkan sampai Jerman. (http://www.longwarjournal.org/archives/2013/07/the_al_qaeda_threat_1.php, diakses pada 14 Februari 2017).

Masuknya Al-Qaeda di dalam Turki di tandai dengan adanya Terjadinya peristiwa Turkey's 9/11: *The November Attacks* di Turki, serta serangkaian peristiwa pengebomana yang terjadi dalam rentang tahun 2003 – 2013. Masuknya kelompok ini ke dalam Turki didasari oleh adanya anggapan dari kelompok ini bahwa Turki sebagai “penghianat” karena menghapuskan sistem pemerintahan kekhalifahan di akhir masa Kekaisaran Otoman dan sebagai “boneka barat”, khususnya kepada Amerika Serikat. Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas pengeboman yang terjadi di Turki pada tahun 2003 – 2013. Yang pada tahun 2003 menewaskan 60 terbunuh dan 700 orang dalam keadaan luka. SCO memiliki badan dalam menanggulangi terorisme yakni RATS, yang memiliki kativitas meliputi pertukaran informasi seputar ancaman teroris, pemberian rekomendasi kegiatan untuk melawan aksi terorisme dan pemantauan pergerakan aktivitas teroris berserta pendanaannya. Badan ini bertanggung jawab atas latihan militer negara-negara anggotanya dalam SCO. (Marcel de Hass Shanghai Cooperation and the OSCE: Two of a Kind?,” *Helsinki Monitor: Security and Human Rights* 18, no. 3: 248)

Sebagai negara yang memiliki permasalahan keamanan yang berasal dari negara-negara di sekitarnya maka Turki berupaya untuk bekerjasama dengan organisasi regional yang dekat dengan negaranya. SCO merupakan organisasi yang dirasa mampu dalam segi kelembagaan dan kedekatan secara geografis untuk menjaga keamanan di dalam Turki. Kehadiran SCO di Turki dapat melindungi Turki dari ancaman keamanan di level regional.

Status mitra dialog yang miliki Turki dalam keorganisasian SCO menjadikan Turki tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan. Turki hanya diperbolehkan untuk menghadiri dan ikut serta dalam pertemuan-pertemuan kelembagaan bersifat ceremony dan menjalankan kerjasama berdasarkan MOU yang di sepakati kedua belah pihak. Posisi Turki sebagai mitra dialog telah memberikan batasan untuk Turki dalam beraktifitas didalam organisasi SCO, sehingga hal ini mendorong Turki untuk menjadi anggota penuh agar dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di dalam organisasi SCO. Hal ini dirasa akan dapat mempengaruhi

kebijakan luar negeri Turki dalam mengembangkan visi-misinya sebagai negara pusat politik internasional.

Kepentingan Ekonomi

A. Meningkatkan GDP dengan kerjasama Perdagangan.

Dalam mengawali perkembangannya Turki memberikan konsentrasi pada sektor ekonomi dengan menaikkan tingkat produk domestik (GDP) dengan cara mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sekaligus membaca peluang ekonomi secara intensif. Dan juga meningkatkan standar infrastruktur, kepedulian atas pendidikan dasar dan kesehatan. Oleh Erdogan Perdana Menteri Turki memiliki ambisi untuk meningkatkan grafik GDP nasional sesuai dengan parameter perkembangan pembangunan modern.

Posisi Turki yang berada di tengah jalur distribusi barang dan jasa telah menjadi potensi bagi perekonomian Turki. Stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur, dan perjanjian kerjasama lintas geografis menjadi konsentrasi pembangunan Turki pada dekade berikutnya setelah reformasi perekonomian Ozal. Liberalisasi yang dibawa oleh Ozal terus dilanjutkan oleh AKP hingga sekarang dengan menjadikan Turki sebagai negara eksportir. Tumbuhnya Perekonomian Turki pada pemerintahan AKP merupakan pelaksanaan dari program stabilitas yang ditawarkan oleh *international monetary fund* (IMF) dan mengadopsi kebijakan strategi untuk menjadi anggota Uni Eropa, sebagai pendorong dari perubahan yang ingin diwujudkan.

Aktifitas perdagangan luar negeri meningkat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menfokuskan pada sektor ekonomi liberal. Dimana nilai ekspor dan impor merupakan salah satu sumbangsih terbesar dalam meningkatkan GDP nasional. Berikut data GDP dan total export/import Turki pasca pembentukan kebijakan liberal oleh Ozal dan setelah AKP memegang pemerintahan Turki, terhitung dari tahun 1995 hingga 2007. Sekitar 55% ekspor Turki ditujukan kepada negara-negara Uni Eropa, dimana Turki telah mendapatkan *previlis* (keistimewaan) sejak 1996. Namun pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Turki justru meningkat saat mempromosikan produk-produknya di negara-negara tetangga seperti Asia dan Afrika. Sejak tahun 2003, ekspor ke Bulgaria dan Romania meningkat menjadi \$3miliar dan \$5 miliar, dan ekspor ke negara-negara tetangga meningkat dari 7% menjadi total 33%. Ekspor ke Rusia meningkat dari \$10 miliar menjadi \$25 miliar (M. Sya'roni Rofil. Partai Akp Dan Ideologi Islam Di Turki Modern (2001-2007). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008).

Sejak tahun 90-an Turki telah memainkan perannya secara politik di kawasan Asia Tengah dengan mendukung kemerdekaan dan demokratisasi negara-negara di dalamnya. Dan pasca perang dingin Turki juga menfokuskan Asia Tengah untuk ditempatkan pada sector ekonomi dimana para pembisnis Turki mendapatkan tempat baru untuk berinvestasi. AKP memiliki karakteristik memimpin dengan membuka kesempatan seluas mungkin untuk investor yang ingin menanamkan modal atau membeli saham di bidang ekonomi.

Dalam sektor ekonomi keinginan Turki untuk bergabung dengan SCO merupakan usaha untuk aktivitas perdagangan internasional. SCO digunakan untuk memperluas pasar di Asia, dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pasar Turki didominasi oleh Eropa. Melalui SCO, volume perdagangan internasional Turki diharapkan dapat ditingkatkan di negara-negara Asia Tengah. Mengingat SCO memiliki potensi yang besar sebagai pasar bagi produsen Turki. Hal tersebut ditunjukkan oleh luas wilayah sebesar 60% dari total Eurasia dan populasi penduduk sekitar 45% dari total populasi dunia yang dimiliki oleh SCO. (Fatih Mehmet Bulut dan Nihal Aghazade (2015), “*Palace Of Shanghai Cooperation Organization’s in the New World Order*”, *European Scientific Journal* 11, no. 7:78.)

SCO memiliki mekanisme perdagangan bebas untuk menstimulasi kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara anggotanya, yakni *Joint Initiative in Increasing Multilateral Economic Cooperation in The Field Of Trackling The Consequences Of The Global Financial Economic Crisis And Ensuring Further Economic Development Of The Shanghai Cooperation Organization Member States* yang disepakati pada tahun 2009 (<http://www.sectsc.org/EN123/show.asp?id=146>, diakses pada 05 Juni 2016). Mekanisme ini mencakup kerjasama kepabeanan negara-negara anggota dalam berbagai informasi dan meningkatkan infrastruktur kepabeanan, memfasilitasi asosiasi pembisnis dan investor untuk melakukan dan membahas bidang investasi bersama, pemanfaatan *SCO Business Council* dan *Interbank Consortium* dalam mempromosikan proyek-proyek kerjasama, dan pembangunan infrastruktur seperti rute transportasi internasional di negara-negara anggota. Turki dapat mempromosikan kepentingan-kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di level Dewan Kepala Negara dan Dewan Kepala Pemerintah. Kedua Dewan merupakan dua badan tertinggi dalam SCO, dimana badan-badan tersebut memiliki otoritas dalam memutuskan fokus dan prioritas organisasi dan agenda-agenda yang menyangkut bidang ekonomi.

B. Kebututuhan Energi

Energi merupakan tujuan utama dalam mitranya dengan Rusia dan China, hal ini dikarenakan kebutuhan industry domestik Turki yang semakin meningkat. Ketertarikan Turki terhadap Rusia dalam kerjasama disektor energi terlihat setelah dimulainya pembangunan proyek gas alam *Blue Stream* pada tahun 2002 yang menandakan perkembangan penting bagi keamanan energi Turki. Turki merupakan konsumen terbesar gas alam Rusia yang disambungkan melalui dua pipa yakni *Blue Stream* dan *Trans-Balkan*. Hal ini dilakukan guna memastikan ekspor stabil untuk pasar Eropa dan untuk mencapai keamanan energy (Nigyar masumova. *The current state of trade and economic relations between Rusia dan Turkey*).

Sebagai negara yang memiliki akses penuh di kawasan Asia Tengah maka Rusia dan China mendominasi eksploitasi energy di wilayah ini. Maka sebagai negara yang sedang menuju kekuatan ekonomi terbesar Turki mencoba untuk ikut terlibat didalam kawasan sebagai kekuatan baru yakni jalur perdagangan yang menjembatani antara Barat dan Timur sebagai negara *energy hub* dan menjaga

ketahanan energy bagi domestik Turki yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.

SCO memiliki tujuan untuk menciptakan persatuan pasar energi negara-negara anggota dan negara pengamat, yang juga terdiri dari negara-negara produsen energi minyak dan gas seperti Rusia, Kazakhstan, Iran dan Uzbekistan, serta negara-negara konsumen energi seperti China, Tajikistan, Kyrgystan, Pakistan dan Mongolia yang tertuang dalam *Energy Club*. *Energy Club* hadir untuk mengembangkan dialog-dialog seputar peningkatan ketahanan energi, koordinasi dan strategi dalam mengatur pendistribusian (*streaming*), serta sebagai *platform* dalam mengadakan diskusi-diskusi yang komperhensif seputar energi di bawah kerangka kerjasama SCO dalam mengatasi isu-isu seperti liberalisasi pengenaan tarif, penyatuan tarif transportasi (pendistribusian) energi, pengenaan pajak bersama, dan pengkoordinasian aktivitas-aktivitas supplier untuk memaksimalkan kompetisi antar sesama anggota. (<http://infoshos.ru/en/?idn=13913>).

Maka sebagai negara yang sedang menuju kekuatan ekonomi terbesar penting bagi Turki untuk mencoba ikut terlibat dalam kawasan sebagai kekuatan baru yakni jalur perdagangan yang menjembatani antara Asia dan Eropa sebagai negara *energy hub* dan menjaga ketahanan energi bagi domestik Turki yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Salah satu usaha Turki dalam memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan domestiknya adalah dengan memperluas kerjasama dalam bidang energi dengan menjadi anggota penuh SCO atau hanya sebagai negara pengamat. Dengan menjadi anggota tetap, Turki akan dapat menikmati insentif SCO di bidang energi melalui kerangka kerjasama *Energy Club*.

Kesimpulan

Dalam upaya Turki bergabung dengan SCO, Turki memiliki kepentingan terkait dengan kepentingan nasional, yakni Kepentingan Keamanan dan Kepentingan Ekonomi. Dalam kepentingan Keamanan, Turki ingin bekerjasama dengan SCO secara penuh dalam memerangi perdagangan narkoba dan pencegahan terorisme. SCO memiliki mekanisme perjanjian dalam memerangi narkoba yakni, *Agreement on Cooperation in Combating Illicit Trafficking on Narcotic Drugs, Psytropic Substance and Their Precursor*. Dalam memerangi terorisme, Turki telah berpartisipasi dalam latihan anti-teror gabungan, *Kasygurt – Anti-terror 2013* yang dilaksanakan di Kazakhstan. Karena keterbatasannya sebagai mitra dialog Turki tidak dapat mengikuti rapat dalam tingkat Kepala Dewan Negara, sehingga didalam dua mekanisme kerja ini Turki tidak dapat mengikuti proses formulasi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh SCO sehingga Turki tidak dapat memilih untuk mengikuti program yang disepakati oleh negara-negara anggota SCO.

Sedangkan kepentingan ekonomi, pertama yakni, Turki ingin meningkatkan GDP dengan melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara di Asia Tengah melalui organisasi SCO, dan kedua yakni, agar dapat menjadi *energy hub* untuk Asia dan Eropa serta memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hal ini

dikarenakan didalam SCO terdapat mekanisme perdagangan bebas yang digunakan untuk menstimulasi kerjasama ekonomi antar negara anggotanya yakni, *Joint Initiative in Increasing Multilateral Economic Cooperation in The Field Of Tracking The Consequences Of The Global Financial Economic Crisis And Ensuring Further Economic Development Of The Shanghai Cooperation Organization member States*. Apabila Turki dapat bergabung sebagai anggota SCO maka Turki dapat mempromosikan kepentingan-kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di level Kepala Dewan Negara dan Kepala Dewan Pemerintah. Dalam memenuhi kebutuhan energi, Turki ingin tergabung sebagai *Energy Club* yang terdiri dari negara-negara produsen minyak dan gas di Asia Tengah. Dengan menjadi anggota penuh dalam SCO maka Turki dapat menerima insentif dalam bidang energi melalui kerangka kerjasama *Energy Club* ini.

Referensi

Buku

Buzan Barry, *People State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Cold War Era 2nd Edition*. New York : Harvester Wheatsheaf, 1990.

Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Rudy, May T. 2002. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Refika Aditama; Bandung.

Journal Online

Aghazade Nihal dan Fatih Mahmet Bulut. 2015, "*Palace Of Shanghai Cooperation Organization's in the New World Order*", European Scientific Journal 11, no. 7:78.

Doidge Mathew, "*From Developmental Regionalism to Developmental Interregionalism European Union Approach*. NCRE Working Paper No. 07/01, July 2007.

Haas de Marcel (2007), "Shanghai Cooperation and the OSCE: Two of a Kind?," Helsinki Monitor: Security and Human Rights 18.

Hodgson Karen, "*The Al-Qaeda Threat in Turkey*," Long War Journal, 08 Juli 2013, Terdapat di http://www.longwarjournal.org/archives/2013/07/the_al_qaeda_threat_1.php. Diakses pada 14 Februari 2017

Plan of Action of the Shanghai Cooperation Organization Member States and the Islamic Republic of Afghanistan on combating terrorism, illicit drug trafficking and organized crime. Terdapat di

https://www.unodc.org/tldb/pdf/SCO/Plan_of_Action_of_the_Shanghai_Cooperation_Organization_Member_States_and_the_Islamic_Republic_of_Afghanistan_on_combating_terrorism.pdf Diakses pada 15 februari 2017.

Rahim, Faidah : *Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa*. dalam *Global & Policy Vol.1, No.2, (2013). 215*. Terdapat di http://eprints.upnjatim.ac.id/4859/1/14._214-227_Faidah_Rahim_-_Clash_of_Civilizations_-_Hambatan_Akses_Turki_ke_Uni_Eropa.pdf. Diakses pada 26 Agustus 2016.

Rofil M.Sya'roni, "*Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki 2001-2007*," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2008.

Media Elektronik

Christin Lidya Sinaga. "*Cina dan Shanghai Cooperation Organization*", terdapat di <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/111-cina-dan-shanghai-cooperation-organization>. Diakses pada 05 Juni 2016.

Chouvy Arnaud and Pierre. "*Opiate Smuggling Routes From Afghanistan To Europe and Asia*. Jane's Intelligence Review. Vol. 15 N 03, Maret 2003, pp. 23-35. Terdapat di <http://geopium.org/?p=185>. Diakses pada 12 Januari 2017.

"*Drug Trafficking*". Terdapat di <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/>. Diakses pada 15 Januari 2017.

Fath, "*Ditanggungkan Uni Eropa, PM Erdogan ingin beralih ke Shanghai*", 2013. Terdapat di (<http://vps-111729213465.manage.myhosting.com/detail.php?id=132338>). Diakses pada 05 Juni 2016.

Gursel Kadri, "*Erdogan Serious About Turkey's Bid for Shanghai 5 Membership*". 2013. Terdapat di <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/shanghai-cooperation-organization-erdogan-turkey.html>. Diakses pada 26 Agustus 2016.

Info SCO, 2015, "*SCO Energy Club: Structure Ready for International Interaction, Not Shanghai Six's Elite Club*, March 26, 2015. Terdapat di <http://infoshos.ru/en/?idn=13913>. Diakses pada 15 Februari 2017

Masumova Nigtar. "*The Current State of Trade and Economic relations between Rusia and Turkey*". Terdapat di <http://www.dw.com/id/sco-beri-status-pengamat-bagi-afghanistan/a-16006115>. Diakses pada 3 februari 2017.

“SCO Joint Initiative on Increasing Multilateral Economic Cooperation in the Field of Trackling the Consequences of the Global Financial Economic Crisis”, The Shanghai Cooperation Organization, 14 Oktober 2009, terdapat di <http://www.sectesco.org/EN123/show.asp?id=146>, diakses pada 15 Februari 2017

Shanghai Cooperation Organization. terdapat di <http://www.infoshos.ru/en/?idn=10014>. Diakses pada 05 Juni 2016.